

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Program prioritas pembangunan pada RKPD Perubahan Kota Kediri Tahun 2017 ini tetap mengacu pada RKPD 2017 awal. Penambahan anggaran diarahkan untuk mencapai sasaran dan target 9 (sembilan) program prioritas yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri tahun 2014-2019, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik

Sasaran utama dari prioritas ini adalah meningkatnya efektifitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah untuk pelayanan publik yang berkualitas, terwujudnya manajemen aparatur sipil negara yang mengarah pada kebutuhan pelayanan prima di seluruh satuan kerja perangkat daerah Kota Kediri serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Kota Kediri dipantau secara terus menerus melalui survey indeks kepuasan masyarakat dan program SURGA (SUara waRGa) yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat secara langsung melalui media internet maupun telepon seluler.

Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat akan memberikan umpan balik bagi peningkatan layanan publik. Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik, antara lain: peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, penataan dan penyempurnaan kebijakan

sisdur pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pelayanan prima serta penataan administrasi kependudukan.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat

Infrastruktur yang memadai secara kuantitas dan kualitas merupakan penopang bagi perekonomian masyarakat. Selain itu, upaya menciptakan kenyamanan dalam masyarakat dapat diwujudkan salah satunya melalui penyediaan infrastruktur. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait infrastruktur, diantaranya: genangan air yang masih muncul di beberapa titik ketika hujan deras, lampu penerangan jalan belum menjangkau semua lokasi, sarana-prasarana persampahan yang belum optimal, ruang terbuka hijau yang masih minim, masalah sarana prasarana transportasi yang masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan melalui program/kegiatan SKPD terkait. Upaya yang dilakukan mengatasi berbagai masalah tersebut adalah melalui penyediaan infrastruktur dasar masyarakat meliputi jalan dan jembatan, sarana-prasarana gedung kantor, drainase untuk pengendalian banjir, pengelolaan jaringan irigasi, sarana-prasarana persampahan, penyediaan ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana pelayanan angkutan darat, sarana dan prasarana lalu lintas, penyelenggaraan jasa layanan komunikasi dan informasi, serta infrastruktur pendukung lainnya.

3. Penataan Kota yang Ramah Lingkungan dan Berbasis Ekologi

Masalah lingkungan merupakan isu global yang perlu diselesaikan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat maupun swasta harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas pembangunan Kota Kediri.

Sasaran yang ingin dicapai pada prioritas ini adalah sebagai berikut : meningkatnya kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan pelaksanaan AMDAL, meningkatnya pengendalian dan pemantauan mutu sumber daya air, meningkatnya ketaatan penegakan hukum lingkungan, meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Sampai saat ini, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Kediri relatif baik dan terjaga, hal ini tercermin dari tidak terjadinya konflik-konflik yang bermotif Suku Ras dan Agama (SARA).

Dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah Kota Kediri berupaya secara terus menerus menjalin komunikasi dan mempererat hubungan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) serta seluruh elemen masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya menciptakan kerukunan antar semua elemen masyarakat serta untuk deteksi dini terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat agar segera dapat diselesaikan.

Selain itu, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian kepada organisasi keagamaan dan meningkatkan sarana-prasarana ibadah. Hal ini diwujudkan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait maupun pemberian hibah kepada organisasi keagamaan.

5. Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan

Industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup. Ekonomi kreatif menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional selain ekonomi pertanian, industri, dan informasi. Dari

ekonomi kreatif, banyak tenaga kerja terserap, ekonomi kreatif juga memiliki nilai lebih karena meningkatkan citra dan identitas daerah.

Pemerintah Kota Kediri mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Kota Kediri sehingga dapat membuka lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang masih menganggur. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas ini adalah melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pemberian kredit lunak kepada UMKM, pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri, fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, pengembangan potensi usaha produk unggulan, pengembangan pasar dan distribusi barang produk, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

6. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, membaiknya status gizi masyarakat, serta menurunnya penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan pembangunan kesehatan tahun 2017 diarahkan pada pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada puskesmas baik secara manajemen, tenaga medis, maupun sarana dan prasarana puskesmas, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada rumah sakit umum daerah (dengan meningkatkan layanan pada RSUD Gambiran maupun menambah layanan kesehatan yang berkualitas dengan mewujudkan RSUD Gambiran II sebagai rumah sakit tipe B), serta peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Selain itu, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga dilakukan secara promotif-preventif melalui beberapa kegiatan, antara lain: pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan masyarakat

tentang pola hidup sehat, pemberian makanan tambahan, penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang vitamin A, dan kekurangan zat mikro lainnya, pengawasan obat dan makanan, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

7. Peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan

Pembangunan pendidikan yang berkualitas tercermin pada proses pembelajaran yang efektif dengan menyediakan guru-guru bermutu yang memiliki kompetensi profesional, manajemen pendidikan yang baik serta sarana-prasarana yang memadai. Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kota Kediri yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, mengembangkan minat dan bakat, menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, toleran dan disiplin.

Upaya untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan di Kota Kediri dilaksanakan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal (PNF), serta program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sejalan dengan itu, peningkatan mutu pelayanan pendidikan diupayakan melalui program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta manajemen pelayanan pendidikan.

8. Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik prasarana, sosial, dan ekonomi masyarakat

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat pada satuan wilayah terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT). Masyarakat pada tingkat RT lebih mengetahui kebutuhan mendasar yang ada di lingkungannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Kediri memfasilitasi dengan program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS) agar masyarakat dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhannya. Namun demikian, agar program ini tepat sasaran maka kegiatannya diarahkan pada infrastruktur, ekonomi dan sosial.

Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah

Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Selain program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kelurahan dengan melibatkan masyarakat tingkat RT, Pemerintah Kota Kediri juga melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang dilaksanakan SKPD terkait.

9. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran perempuan dan pemuda. Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan merevitalisasi organisasi-organisasi perempuan dan perlindungan terhadap perempuan. Sedangkan pembangunan kepemudaan dan olah raga diarahkan peningkatan peran pemuda dalam pembangunan serta pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.

Sementara itu, pembangunan bidang seni dan budaya diarahkan pada pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, pengembangan nilai budaya serta pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kota Kediri sehingga diharapkan dapat mengungkit perekonomian masyarakat.

Adapun ringkasan perubahan Anggaran Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran
Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.152.340.169.254,62	1.205.186.381.592,00	52.846.212.337,38
1.1	Pendapatan Asli Daerah	202.308.331.247,62	240.812.676.203,18	38.504.344.955,56
1.1.1	Pajak Daerah	75.432.321.913,00	78.688.821.913,00	3.256.500.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.240.938.750,00	10.241.250.300,00	311.550,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.816.023.075,62	1.995.845.162,82	179.822.087,20
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	114.819.047.509,00	149.886.758.827,36	35.067.711.318,36
1.2	Dana Perimbangan	872.386.631.007,00	880.639.495.388,82	8.252.864.381,82
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	113.696.837.837,00	128.024.573.837,00	14.327.736.000,00

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	640.152.240.170,00	634.077.069.551,82	(6.075.170.618,18)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	118.537.553.000,00	118.537.852.000,00	299.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	77.645.207.000,00	83.734.210.000,00	6.089.003.000,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	70.145.207.000,00	73.750.000.000,00	3.604.793.000,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintahan desa	0,00	2.484.210.000,00	2.484.210.000,00
1.3.6	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
2	BELANJA	1.343.004.503.718,00	1.416.093.755.453,05	73.089.251.735,05
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	518.893.504.275,00	526.665.487.983,50	7.771.983.708,50
2.1.1	Belanja Pegawai	446.127.515.000,00	433.491.643.708,50	(12.635.871.291,50)
2.1.4	Belanja Hibah	33.687.629.250,00	43.441.290.250,00	9.753.661.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	32.051.299.350,00	43.421.518.350,00	11.370.219.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	727.060.675,00	727.060.675,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.300.000.000,00	5.583.975.000,00	(716.025.000,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	824.110.999.443,00	889.428.267.469,55	65.317.268.026,55
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(190.664.334.463,38)	(210.907.373.861,05)	(20.243.039.397,67)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	190.664.334.463,38	210.907.373.861,05	20.243.039.397,67
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	210.664.334.463,38	230.907.373.861,05	20.243.039.397,67
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	210.664.334.463,38	230.907.373.861,05	20.243.039.397,67
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00

Perubahan belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga.

Penggunaan belanja tidak langsung pada Perubahan RKPD Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Pada APBD awal Tahun Anggaran 2017 untuk Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.446.127.515.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.12.635.871.291,50 menjadi Rp.433.491.643.708,50.

b. Belanja Hibah

Belanja hibah dilaksanakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan tujuan

mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Kediri dalam urusan wajib dan urusan pilihan Tahun 2017. Jumlah belanja Hibah dalam Perubahan APBD Tahun 2017 ini sebesar Rp.43.441.290.250,00 naik sebesar Rp.9.753.661.000,00 dari Belanja Hibah di APBD awal sebesar Rp.33.687.629.250,00.

c. Belanja Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial dilakukan untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Jumlah belanja Bantuan Sosial dalam Perubahan APBD Tahun 2017 ini sebesar Rp.43.421.518.350,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.11.370.219.000,00 dari Belanja Bantuan Sosial pada APBD awal sebesar Rp.32.051.299.350,00.

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Pada perubahan anggaran Tahun 2017 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa sebesar Rp.727.060.675,00 atau tidak mengalami perubahan dari APBD awal.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga ini dialokasikan untuk kegiatan maupun kejadian yang bersifat tidak biasa dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, pada perubahan anggaran tahun 2017 belanja tidak terduga menjadi sebesar Rp.5.583.975.000,00 dari APBD awal tahun 2017 sebesar Rp.6.300.000.000,00.

Sedangkan Plafon Anggaran Perubahan Belanja Langsung per SKPD Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

Tabel 2
Plafon Anggaran Perubahan Belanja Langsung
per SKPD Tahun Anggaran 2017

NO	S K P D	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN	62.364.027.915,00	82.504.823.915,00	20.149.796.000,00
2	SMPN 1 KEDIRI	1.232.759.000,00	2.277.509.000,00	1.044.750.000,00
3	SMPN 2 KEDIRI	1.329.464.500,00	2.341.964.500,00	1.012.500.000,00
4	SMPN 3 KEDIRI	1.298.000.000,00	2.333.000.000,00	1.035.000.000,00
5	SMPN 4 KEDIRI	1.975.000.000,00	3.009.250.000,00	1.034.250.000,00
6	SMPN 5 KEDIRI	1.191.721.000,00	2.170.971.000,00	979.250.000,00
7	SMPN 6 KEDIRI	1.310.000.000,00	2.507.000.000,00	1.197.000.000,00
8	SMPN 7 KEDIRI	1.268.522.000,00	2.176.522.000,00	908.000.000,00
9	SMPN 8 KEDIRI	1.420.000.000,00	2.496.224.080,68	1.076.224.080,68
10	DINAS KESEHATAN	48.496.782.437,00	59.947.396.800,00	11.450.614.363,00
11	RSUD GAMBIRAN	121.030.000.000,00	135.189.937.347,87	14.159.937.347,87
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	213.371.815.811,00	198.913.038.086,00	(14.458.777.725,00)
13	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	15.272.895.000,00	18.422.895.000,00	3.150.000.000,00
14	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.784.479.550,00	4.284.479.550,00	500.000.000,00
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.615.107.000,00	6.324.717.000,00	709.610.000,00
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.299.221.000,00	2.329.221.000,00	30.000.000,00
17	DINAS SOSIAL	9.078.750.000,00	9.078.750.000,00	0,00
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.240.150.000,00	8.340.150.000,00	1.100.000.000,00
19	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	5.138.236.000,00	5.138.236.000,00	0,00
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	26.551.490.000,00	27.201.490.000,00	650.000.000,00
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.528.184.000,00	4.678.184.000,00	150.000.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	13.421.423.100,00	13.446.423.100,00	25.000.000,00
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.339.280.650,00	6.859.280.650,00	520.000.000,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	10.987.553.700,00	10.987.553.700,00	0,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	0,00
26	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.300.000.000,00	10.655.000.000,00	1.355.000.000,00
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2.060.000.000,00	2.060.000.000,00	0,00
28	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	6.402.282.000,00	6.402.730.000,00	448.000,00
29	BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN	4.049.800.000,00	4.349.800.000,00	300.000.000,00
30	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	6.788.905.300,00	8.538.905.300,00	1.750.000.000,00
31	BAGIAN ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.300.000.000,00	7.100.000.000,00	800.000.000,00
32	BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	1.677.185.500,00	1.677.185.500,00	0,00
33	BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN	1.305.000.000,00	1.405.000.000,00	100.000.000,00
34	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	748.037.500,00	748.037.500,00	0,00
35	BAGIAN HUKUM	2.635.383.940,00	2.739.643.940,00	104.260.000,00
36	BAGIAN ORGANISASI	1.545.000.000,00	1.545.000.000,00	0,00

NO	S K P D	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
37	BAGIAN UMUM	18.849.096.800,00	23.251.429.800,00	4.402.333.000,00
38	SEKRETARIAT DPRD	33.500.000.000,00	43.973.321.000,00	10.473.321.000,00
39	INSPEKTORAT	3.624.978.100,00	3.774.978.100,00	150.000.000,00
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN	8.560.350.000,00	8.560.350.000,00	0,00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.185.304.515,00	14.573.556.475,00	(611.748.040,00)
42	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	6.683.500.000,00	6.683.500.000,00	0,00
43	KECAMATAN MOJOROTO	2.418.500.000,00	2.418.500.000,00	0,00
44	KELURAHAN BANDAR LOR	3.153.530.000,00	3.153.530.000,00	0,00
45	KELURAHAN BANDAR KIDUL	2.238.194.000,00	2.238.194.000,00	0,00
46	KELURAHAN BANJARMLATI	2.573.053.000,00	2.573.053.000,00	0,00
47	KELURAHAN POJOK	3.478.407.500,00	3.478.407.500,00	0,00
48	KELURAHAN SUKORAME	2.721.522.500,00	2.729.022.500,00	7.500.000,00
49	KELURAHAN BUJEL	2.617.244.500,00	2.617.244.500,00	0,00
50	KELURAHAN GAYAM	2.347.698.500,00	2.347.698.500,00	0,00
51	KELURAHAN MRICAN	2.820.977.500,00	2.820.977.500,00	0,00
52	KELURAHAN DERMO	1.981.850.000,00	1.981.850.000,00	0,00
53	KELURAHAN NGAMPEL	2.245.286.500,00	2.245.286.500,00	0,00
54	KELURAHAN MOJOROTO	3.459.085.000,00	3.459.085.000,00	0,00
55	KELURAHAN CAMPUREJO	2.494.645.500,00	2.494.645.500,00	0,00
56	KELURAHAN LIRBOYO	2.391.828.750,00	2.391.828.750,00	0,00
57	KELURAHAN TAMANAN	1.946.265.600,00	1.946.265.600,00	0,00
58	KECAMATAN KOTA	2.500.521.200,00	2.500.521.200,00	0,00
59	KELURAHAN SEMAMPIR	3.112.418.000,00	3.112.418.000,00	0,00
60	KELURAHAN BALOWERTI	2.627.742.500,00	2.627.742.500,00	0,00
61	KELURAHAN DANDANGAN	3.189.252.000,00	3.201.252.000,00	12.000.000,00
62	KELURAHAN NGADIREJO	4.338.505.225,00	4.338.505.225,00	0,00
63	KELURAHAN BANJARAN	3.646.326.000,00	3.646.326.000,00	0,00
64	KELURAHAN KALIOMBO	3.339.436.000,00	3.339.436.000,00	0,00
65	KELURAHAN NGRONGGO	4.798.320.000,00	4.798.320.000,00	0,00
66	KELURAHAN MANISRENGGO	3.046.305.000,00	3.046.305.000,00	0,00
67	KELURAHAN REJOMULYO	2.134.102.800,00	2.134.102.800,00	0,00
68	KELURAHAN KEMASAN	858.500.000,00	858.500.000,00	0,00
69	KELURAHAN POCANAN	851.660.350,00	851.660.350,00	0,00
70	KELURAHAN RINGINANOM	968.022.500,00	968.022.500,00	0,00
71	KELURAHAN KAMPUNG DALEM	2.053.926.000,00	2.058.926.000,00	5.000.000,00
72	KELURAHAN SETONO PANDE	2.505.178.500,00	2.520.178.500,00	15.000.000,00
73	KELURAHAN JAGALAN	856.139.000,00	856.139.000,00	0,00
74	KELURAHAN PAKELAN	1.567.502.500,00	1.567.502.500,00	0,00
75	KELURAHAN SETONO GEDONG	706.702.500,00	706.702.500,00	0,00
76	KECAMATAN PESANTREN	2.642.467.000,00	2.642.467.000,00	0,00
77	KELURAHAN BANGSAL	2.873.307.250,00	2.873.307.250,00	0,00
78	KELURAHAN PAKUNDEN	3.119.693.000,00	3.119.693.000,00	0,00
79	KELURAHAN TOSAREN	3.521.287.000,00	3.521.287.000,00	0,00
80	KELURAHAN JAMSAREN	3.299.755.000,00	3.304.755.000,00	5.000.000,00
81	KELURAHAN SINGONEGARAN	3.549.105.000,00	3.549.105.000,00	0,00
82	KELURAHAN BLABAK	2.717.353.500,00	2.717.353.500,00	0,00
83	KELURAHAN BETET	2.080.316.500,00	2.080.316.500,00	0,00
84	KELURAHAN TINALAN	2.611.299.450,00	2.646.299.450,00	35.000.000,00
85	KELURAHAN BAWANG	2.447.024.500,00	2.447.024.500,00	0,00
86	KELURAHAN NGLETIH	1.336.465.000,00	1.336.465.000,00	0,00
87	KELURAHAN TEMPUREJO	2.052.920.000,00	2.052.920.000,00	0,00
88	KELURAHAN KETAMI	2.630.726.500,00	2.630.726.500,00	0,00

NO	S K P D	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
89	KELURAHAN PESANTREN	2.824.939.500,00	2.824.939.500,00	0,00
90	KELURAHAN BANARAN	2.014.309.500,00	2.014.309.500,00	0,00
91	KELURAHAN BURENGAN	2.831.695.500,00	2.831.695.500,00	0,00
J U M L A H		824.110.999.443,00	889.428.267.469,55	65.317.268.026,55

Adapun Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD diuraikan sebagai berikut :